



# Jalan Rusak Sumbang Inflasi

## Eksplorasi SDA Picu Kerusakan Infrastruktur

PONTIANAK— Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat memicu kerusakan jalan. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak besar bagi kegiatan perekonomian. Percepatan mobilisasi ekonomi terganggu. Persoalan tersebut akhirnya menyumbang tingginya inflasi di Kalbar.

"Infrastruktur rusak, ekonomi terganggu akibat distribusi barang sulit. Akibatnya inflasi Kalbar menjadi tinggi," kata Edi Suratman, Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, di Rektorat Untan, kemarin.

Edi mengungkapkan pada Februari tahun ini, inflasi di Kalbar mencapai 2,3 persen. Angka tersebut menjadi angka inflasi tertinggi di Indonesia. Penyebabnya adalah distribusi barang yang



**KUNJUNGAN:** Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa menerima karikatur saat bertandang ke ruangan redaksi Pontianak Post, kemarin(20/3).

◆ Ke Halaman 7 kolom 1





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## Jalan Rusak Sumbang Inflasi

*Sumbangan dari halaman 1*

sulit menyebabkan harga meningkat.

Tingginya inflasi tersebut merugikan masyarakat. "Yang rugi kita, uang kita menjadi tidak ada harganya," ujar Edi.

Perbaikan infrastruktur terus dilakukan. Bahkan, pada satu lokasi bisa dilakukan perbaikan infrastruktur jalan sebanyak dua kali dalam tiga tahun. Menurut Edi, hal ini dikarenakan perencanaan yang tidak bagus. "Sehingga tidak efisien," katanya.

Persoalan infrastruktur jalan ini juga menjadi perhatian mahasiswa Untan. Infrastruktur yang disoroti adalah jalan di lingkungan Untan sendiri. Seperti diungkapkan mahasiswa Fakultas Hukum Untan, S Marpaung Ali Masykur Musa. Marpaung Ali Masykur Musa, Marpaung mempertanyakan jalan pada satu lokasi di Untan yang diperbaiki sebanyak dua kali dalam tiga tahun.

"Selama tiga tahun saya di sini, dua kali jalan diperbaiki. Kok bisa seperti itu," katanya. Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa berterima kasih atas informasi yang diberikan

tersebut. Ia meminta mahasiswa tak segan memberi informasi kepada BPK sehingga BPK dapat melakukan pemeriksaan.

"Anggaran infrastruktur secara nasional yang dikelola Dirjen Bina Marga dalam setahun mencapai Rp42 triliun. Ini berbagi ke seluruh daerah, termasuk di Kalbar," kata Ali.

Menurut Ali, berdasarkan teori yang ada, kemampuan dan daya tahan infrastruktur selama lima tahun. "Jika ada yang dua tahun sekali diperbaiki, pasti ada sesuatu yang ada yang tidak sesuai spek dan kualitasnya," ungkap Ali.

Saat ini, lanjut Ali, tim BPK RI sedang melakukan pemeriksaan infrastruktur pekerjaan umum. "Akan dilihat tahun anggaran infrastruktur tersebut, timpalnya.

Buruknya infrastruktur di Kalimantan Barat menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan jeleknya kualitas infrastruktur di Kalbar dan daerah-daerah lain di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu pemicunya adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh para pemegang

konsesi pertambangan dan perkebunan.

"Era disentralisasi telah memicu eksploitasi besar-besaran sumber daya alam kita. Izin-izin di pertambangan dan perkebunan seperti diobral oleh pemerintah daerah. Akhirnya tidak ada jalan mulus lagi di daerah sekitar wilayah eksploitasi tersebut," ujarnya kala menyambangi kantor redaksi Pontianak Post, kemarin (20/3).

Faktor lainnya, lanjut dia, adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait rencana pembangunan infrastruktur. Namun ketika rehabilitasi infrastruktur bermasalah yang kemudian diprotes oleh masyarakat, para pemangku kekuasaan tersebut saling lempar tanggung jawab.

BPK juga menemukan banyak kebocoran anggaran dalam pembangunan maupun perawatan infrastruktur di sejumlah wilayah di negara ini. Para pelaksana proyek kerap mengambil keuntungan dengan cara menurunkan spesifikasi jalan yang dikerjakannya. "Banyak yang tidak sesuai speknnya. Yang seharusnya ketebalan aspalnya atau

batunya tinggi menjadi rendah. Akhirnya tambal sulam," ungkapnya.

Apalagi khusus infrastruktur jalan, kata Ali, anggaran yang tersedia cukup terbatas. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum hanya mendapat alokasi sekitar Rp 42 triliun per tahun. Angka tersebut jauh berada di bawah subsidi untuk bahan bakar minyak nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tiap tahunnya.

Belum lagi permainan proyek yang melibatkan para pemegang kebijakan. Tidak sedikit pengerjaan proyek yang sebelum tender digelar sudah ditentukan pemenangnya. Bahkan ketika dalam tender, pemenangnya bukan dari perusahaan yang diinginkan, maka tender bisa kembali diulang.

Buruknya infrastruktur dan manajemen itu lah yang membuat ongkos ekonomi di Indonesia menjadi tidak efisien. "Indonesia hanya di peringkat 44 dari negara-negara di dunia untuk ukuran daya saing dan kelayakan investasi. Ini karena transportasi dan infrastruktur kita tidak efisien," sebutnya.

(uni/ars)